

**SIKAP POLITIK AJENGAN SUKAMANAH  
(KONFRONTASI K. H. ZAINAL MUSTHAFA DENGAN PENGUASA JEPANG 1942-  
1944)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya  
UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)

**Oleh:**

**CENG ROMLI**  
**NIM : 10120090**

**JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM  
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ceng Romli

NIM : 10120090

Jenjang /Jurusan : S1/Sejarah dan Kebudayaan Islam

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya penelitian/  
karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 11 Agustus 2017  
18 Dzul Qa'dah 1438

Saya yang menyatakan,



Ceng Romli  
NIM: 10120090

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**NOTA DINAS**

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Adab dan  
Ilmu Budaya**  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul :

**Sikap Politik Ajengan Sukamanah  
(Konfrontasi K. H. Zainal Musthafa dengan penguasa Jepang 1942-1944)**

yang ditulis oleh:

Nama : Ceng Romli  
NIM : 10120090  
Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam sidang munaqasyah.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Agustus 2017 M  
18 Dzul Qa'dah 1438 H  
Dosen Pembimbing,

  
Prof. Dr. H. Mundzirin Yusuf, M. Si  
NIP. 19500505 197701 1 001





## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-527/Un.02/DA/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : SIKAP POLITIK AJENGAN SUKAMANAH (KONFRANTASI KH. ZAINAL MUSTAFA DENGAN PENGUASA JEPANG 1942-1944

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CENG ROMLI  
Nomor Induk Mahasiswa : 10120090  
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Agustus 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof.Dr. H. Mundzirin Yusuf, M.Si.  
NIP. 19500505 197701 1 001

Penguji I

Penguji II

  
Dr. Sujadi, M.A.  
NIP. 19701009 199503 1 001

  
Dra. Soraya Adnani, M.Si.  
NIP. 19650928 199303 2 001

Yogyakarta, 18 Agustus 2017  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya  
DEKAN



  
Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.  
NIP. 19600224 198803 1 001

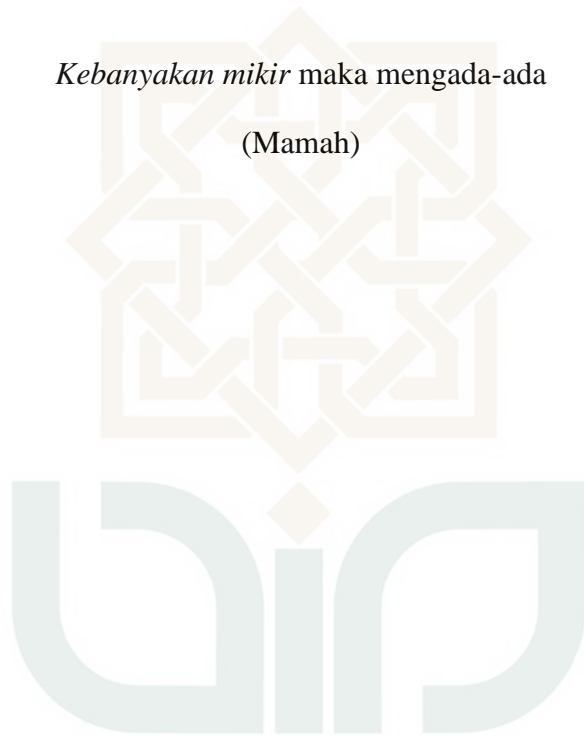
Motto :

Aku berpikir maka aku ada

(Rene Descartes)

*Kebanyakan mikir* maka mengada-ada

(Mamah)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bapa , Mamah.*

*Aji si gede pangarti*

*Ari si alus budi*

*Ima, kanyaah Bapa*

Almamater tercinta

Pondok Pesantren Perguruan K. H. Zainal Musthafa Sukamanah

Progam studi Sejarah Kebudayaan Islam

Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

Unuversitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga

Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

### SIKAP POLITIK AJENGAN SUKAMANAH

#### (Konfrontasi KH. Zainal Musthafa Pada Penguasa Jepang 1942-1944 M)

Ajengan adalah gelar untuk pemuka agama Islam atau ulama di daerah Jawa Barat khususnya di Tasikmalaya, di pulau Jawa populer dengan istilah kiai. Pada umumnya ajengan memiliki lembaga pendidikan pesantren sebagai dedikasi pada pendidikan agama dan masyarakat, maka ajengan identik dengan nama daerah atau pesantren binaannya. Pada era penjajahan, ajengan memiliki peran penting tidak hanya sebagai guru agama yang memperkuat religiositas umat muslim, tetapi juga sebagai bagian elit pedesaan yang ikut terlibat dalam urusan sosial-politik masyarakat. Karena peran itu pula ulama menjadi terlibat dalam kemunculan sentimen anti-kolonial di beberapa daerah di Hindia Belanda.

Pada masa pendudukan Jepang, politik akomodatif Jepang terhadap Islam mendapatkan simpati sebagian besar para ulama terkait rivalitas Jepang dengan Belanda di tingkat internasional dan kebijakan kolaboratif yang ditawarkan Jepang pada Islam di Hindia-Belanda. Politik akomodatif Jepang menjadi tantangan bagi para ulama untuk menentukan sikap. Sebagian besar ulama termasuk yang tergolong dalam organisasi keagamaan MIAI melakukan politik kooperatif untuk menyikapi situasi politik pada masa itu. KH. Zainal Musthafa, ulama dari kampung Cikembang Kawedanaan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya memiliki kekuatan moral yang luar biasa untuk menentang pemerintahan Jepang, mengingat konsekuensi yang lebih berat jika menolak kebijakan Jepang daripada bersikap nonkooperatif pada era Belanda. KH. Zainal Musthafa menyatukan kaum santri dan petani dalam rancangan gerakan perlawanan dengan basis pergerakan pesantren Sukamanah.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sejarah. Adapun analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, penyajian, dan pengambilan keputusan. Peneliti mengumpulkan data melalui *library research* ditunjang dengan data yang diperoleh dari wawancara, dokumen, dan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian untuk melengkapi data yang tersedia dalam beberapa pustaka. Sebagai landasan berpikir peneliti menggunakan teori perjuangan hegemoni Ernesto Laclau dan Muffe.

Penelitian ini ditulis karena konfrontasi KH. Zainal Musthafa dengan pemerintah Jepang di tingkat lokal mampu memberi kontribusi pada proses politik di era pendudukan Jepang. Latar belakang sosial menjadi daya tarik, karena KH. Zainal Musthafa adalah seorang agamawan yang non-politisi, sehingga gerakannya ia mulai dari tingkat akar rumput. Latar belakang historis yang melekat pada nama Sukamanah menjadikan kampung Cikembang berubah nama menjadi kampung Sukamanah. Dalam membangun relasi, K. H. Zainal Musthafa terbuka dengan tokoh-tokoh nasionalis, perbedaan ideologi tidak menyempitkan gerkanannya dalam upaya perlawanan terhadap pemerintah Jepang. K. H. Zainal Musthafa tercatat dalam sel Gerakan Rakyat Anti Fasis (GERAF).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kata kunci : Ajengan, K. H. Zainal Musthafa, Politik, Hegemoni

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab – Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā`	B	Be
ت	tā`	T	Te
ث	śā	Ś	es (dengan titik di atasnya)
ج	jīm	J	Je
ح	hā`	H	ha(dengan titik di bawahnya)
خ	khā`	Kh	ka dan kha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atasnya)
ر	rā`	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	śād	Ş	es (dengan titik di bawahnya)



د	dād	D	de (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā`	Ṭ	te (dengan titik di bawahnya)
ظ	zā`	Z	zet (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fā`	F	Ef
ق	qāf	Q	Qi
ك	kāf	K	Ka
ل	lām	L	El
م	mīm	M	Em
ن	nūn	N	En
و	wāwu	W	We

هـ	hā`	H	Ha
ء	hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā`	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	A
	Kasrah	i	I
	Dammah	u	U

Contoh :

كَتَبَ – kataba

يَذْهَبُ – yazhabu

فَعَلَ – fa'ala

سُئِلَ – su'ila

ذُكِرَ – zukira

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan Ya	ai	a dan i
	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ – kaifa

هَوَّلَ – haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

##### 1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

##### 2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

##### 3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).



## 5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا – rabbanā

نَزَّلَ – nazzala

الْبِرِّ – al-birr

الْحَجِّ – al-hajju

نُعْمَ – nu''ima

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ – ar-rajulu                      السَّيِّدَةُ – as-sayyidatu

الشَّمْسُ – asy-syamsu                      الْقَلَمُ – al-qalamu

الْبَدِيعُ – al-badi'u                      الْجَلِيلُ – al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

a. Hamzah di awal:

أَمِرْتُ – umirtu                      أَكَلَ – akala

b. Hamzah di tengah:

تَأْخُذُونَ – ta'khuzūna                      تَأْكُلُونَ – ta'kulūna

c. Hamzah di akhir:

شَيْءٌ – syai'un                      النَّوْءُ – an-nau'u

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده  
ورسوله. اللهم صلّ وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji yang milik Allah *Subhahu wa Ta'ala*, senantiasa terpanjatkan oleh keberlangsungan proses yang dimulai sejak peristiwa “*Kun*”. Semoga Iman dan Islam berwujud dahaga pada diri kita atas manisnya ilmu yang setetes. Semoga kita semua berada pada siklus Shalawat serta Salam yang dicurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, segenap keluarga, para sahabatnya, para wali, alim-ulama dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan keberlangsungan *Rahmatan lil 'Alamin*.

Terlepas dari keterbatasan dan hambatan yang ada, penulis tetap berusaha dengan segala kemampuan dan dukungan berbagai pihak sehingga pada akhirnya skripsi yang berjudul “Sikap Politik Ajengan Sukamanah (Konfrontasi K. H. Zainal Musthafa dengan penguasa Jepang 1942-1944)” diselesaikan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora dari Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Secara sadar penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak-pihak yang turut membantu dan mendukung dalam proses penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Orang tua penulis, H. Aceng Komarudin (Ayah), Hj. Romlah (Ibu) dan adik-adik, Aceng Muhammad Fajri, Syarif Hidayat dan Ima Siti Aminah

serta semua keluarga besar. Atas keleluasaan mereka penulis dapat berlama-lama mencari ruang di luar rumah.

2. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua dan Sekertaris Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Pembimbing skripsi Prof. Dr. H. Mundzirin Yusuf, M. yang telah memberi banyak arahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, sehingga penulis mendapatkan pengalaman bermanfaat dalam proses penyusunan karya ilmiah.
6. Para Dosen Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, Secara khusus kepada Drs. H. Maman Abdul Malik Sya'roni, M.S yang telah mengarahkan penulis dalam menentukan objek penelitian ini serta Dr. Nurul Hak, S.Ag., M. Hum yang telah memberi informasi banyak berkaitan dengan subjek penelitian ini.
7. Keluarga besar Yayasan KH. Zainal Musthafa.
8. Fahmi L. Nurdin dan keluarga HAMASS (Himpunan Alumni Masyarakat Santri Sukamanah) serta teman-teman ForSASSY (Forum Silaturahmi Alumni Sukamanah-Sukahideng Yogyakarta) dan KPMT-Y (Keluarga Pelajar Mahasiswa Tasikmalaya Yogyakarta)
9. Orang-orang tua saya di *Ojo Dumeh Paviliun* yang senantiasa membantu memberi dukungan serta diskusi hangat.



10. Mas Zuhdi Sang, dua buku dari perpustakaan pribadinya serta bimbingannya ke jalan yang relatif.
11. Teman-teman Komunitas Rimbun, Duo Dul Bersaudara yang senantiasa menjadikan ruang mana saja untuk berdiskusi dan buku menarik. Maaf Iwenk, Mang Asep, Ading, Fuad dan lain-lain tidak disebutkan.
12. Teman-teman Teater Eska, khususnya Oong Fastiasu yang menyediakan ruang karantina. Dewan pengawas ruang karantina Suryadin Abdullah, Gus Nawawi divisi pengadaan buku. Serta teman-teman dalam lingkaran tersebut yang senantiasa memberi gembengan mental sehingga saya dapat menyelesaikan Bab I hingga Bab III. Kecuali Harik dan Mas Buyung.
13. Ust. Tamam Bukhori dan Masjid *Baitu'am Perum Bulog yang menjadi ruang karantina selanjutnya sehingga tugas akhir ini rampung.*
14. Para pejuang; Mang Bedil, Iqbal, Feri, Sofyan Hadi, Hamengku Sofyan, Abdillah Barsas, Mang Asep yang senantiasa berbagi energi dalam situasi darurat waktu. Kawan-kawan SKI 2010 dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu seperti Haji Egi, Thoba-thoba, Ayi, Sabiq, Harik, Novan, dan lain-lain. Trimakasih atas jalinan persaudaraan kita selama ini. mudah-mudahan persahabatan kita terjaga selalu.
15. Ambar Sulistyowati setelah saluran telepon putus, saya mulai serius dengan skripsi. Terimakasih atas bentuk dukungan yang tidak biasa.

Atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak di atas, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. namun demikian, di atas pundak penulislah skripsi ini dipertanggungjawabkan. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Yogyakarta, 25 Agustus 2017  
3 Dzul-Hijjah 1438

**Ceng Romli**  
10120090



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>

### **BAB I. PENDAHULUAN**

<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Batasan dan Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>D. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>10</b>
<b>E. Kerangka Teori.....</b>	<b>12</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>18</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>22</b>

### **BAB II. KONDISI UMUM MASYARAKAT SINGAPARNA; DAMPAK KOLONIALISME DI TASIKMALAYA**

<b>A. Kondisi Sosio-Geografis Singaparna Pra Pendudukan Jepang .....</b>	<b>25</b>
--	-----------

1. Tatahan Sosial Masyarakat Singaparna .....	27
2. Disintegrasi Era Kolonial Belanda .....	29
B. Pergolakan Sosial-Politik Masa Transisi Kekuasaan Belanda- Jepang.....	35
C. Politik Akomodatif Pemerintah Pendudukan Jepang.....	37

### **BAB III. K. H. ZAINAL MUSTHAFA DALAM PERGUMULAN WACANA ANTI-FASIS**

A. Profil K. H. Zainal Musthafa.....	45
1. Latar Belakang Keluarga dan Masa Kecil.....	45
2. Riwayat Pendidikan.....	46
3. Agen Anti-Kolonial Berbasis Pendidikan Islam .....	49
B. Fragmentasi wacana anti-Jepang Sel Geraf (Gerakan Rakyat Anti Fasis).. ..	53
C. Akomodasi Sikap anti-Jepang dalam Sel Geraf (Gerakan Rakyat Anti-Fasis).....	57

### **BAB IV. TINDAKAN PERLAWANAN K. H. ZAINAL MUSTHAFA**

A. Memperjuangkan Identitas Pendidikan Tradisional.....	59
B. Mengambil Langkah Strategis dalam Organisasi.....	65
1. Merumuskan Organisasi Rahasia Geraf (Gerakan Rakyat Anti Fasis).. ..	65
2. Mengambil Langkah Mundur dari Nahdlatul Ulama.....	70
C. Melakukan Pengorganisasian Massa Perlawanan Sukamanah .....	74

### **BAB V. PENUTUP**



A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peran politik ulama di Indonesia mengalami pasang surut dari masa ke masa. Islam yang menjadi agama otoritas pemerintah pada masa Kesultanan Islam membawa peran ulama pada posisi penting dalam institusi pemerintahan. Namun, sejak kedatangan Kolonialisme Barat hingga pendudukan Jepang, identitas politik ulama mengalami tantangan berkepanjangan. Ditengah kondisi pergeseran posisi para ulama dari institusi pemerintahan, peran ulama tidak pernah absen dalam usaha memperjuangkan identitas sosial yang berdaulat pada era Kolonial. Di tengah identifikasi bangsa Eropa yang menilai bangsa pribumi sebagai masyarakat belum terdidik, para ulama mempertahankan eksistensi pendidikan bangsa dengan menjaga keberlangsungan tradisi intelektual dalam sistem pendidikan pesantren hingga berkembang di wilayah pedesaan.

Dedikasi para ulama dalam bidang pendidikan membentuk loyalitas pengikutnya, sehingga ulama tetap memiliki peran penting dalam gerakan sosial yang merupakan elemen penting dalam wacana politik, seperti yang dikutip Dudung Abdurrahman dari Sartono Kartodirdjo:

Sejak abad 18 kekuatan sosial Islam sudah menampilkan peranannya yang sangat besar dalam reaksi masyarakat Indonesia terhadap kekuatan Barat. Di saat dominasi politik dan ekonomi Belanda makin dirasa banyak merugikan penduduk di pedesaan, terutama pada abad ke-20, telah mendorong munculnya gerakan-gerakan *messianik* yang

justru diperkuat oleh unsur-unsur religius. Aspek keagamaan termasuk dalam orientasi gerakan-gerakan sosial pada abad itu, sehingga gerakan rakyat bukan hanya untuk tercapainya harapan messianistik, melainkan terkandung pula di dalamnya ideologi perang sabil menghadapi kekuatan kafir.<sup>1</sup>

Dalam hal ini, ulama memiliki posisi penting dalam struktur sosial masyarakat muslim di pedesaan. Ulama dimaksudkan sebagai sebutan yang diberikan kepada seorang yang dianggap ahli dalam ilmu pengetahuan agama Islam yang mumpuni.<sup>2</sup> Pengkajian Islam yang bersifat responsif dengan realitas sosial menjadikan ulama sebagai tempat bertanya masalah-masalah sosial. Situasi sosial dan kultural pesantren membuat ulama memiliki peran penting tidak hanya sebagai guru agama yang memperkuat religiusitas umat muslim, tetapi juga sebagai bagian elite pedesaan yang ikut terlibat dalam kemunculan sentiment anti-kolonial di beberapa daerah Hindia Belanda.<sup>3</sup> Dalam perlawanan, terlebih ketika kekuasaan telah dikuasai kolonial, posisi ulama atau kiai sangat penting menjadi simbol perlawanan atau perjuangan. Kemampuannya dan kesaktiannya yang luar biasa akan memperteguh daya kohesi dan daya motivasi bagi santri dan masyarakat untuk memosisikan ulama sebagai panutan.<sup>4</sup>

Di sisi lain, posisi ulama bagi masyarakat tradisional dipandang sebagai orang berpendidikan. Sebagai dedikasinya pada bidang keilmuan,

---

<sup>1</sup>Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 99.

<sup>2</sup>Zainul Milal Bizawie, *Laskar Ulama-Santri dan Resolusi Jihad* (Tangerang: Pustaka Compass, 2014), hlm. 11.

<sup>3</sup>Jajat Burhanudin, *Ulama & Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia* (Jakarta: Mizan Publika), hlm. 140.

<sup>4</sup>Bizawie, *Laskar Ulama-Santri dan Resolusi Jihad*, hlm. 17.

biasanya seorang kiai mendirikan lembaga pendidikan pesantren. Istilah pesantren<sup>5</sup> berasal dari pe-santri-an yang berarti tempat belajar para santri belajar ilmu keagamaan di bawah asuhan kiai.<sup>6</sup> Seorang ulama juga dikenal dengan sebutan kiai atau ajengan.<sup>7</sup> Sosok kiai selain berkaitan dengan masalah kharisma, juga berkaitan dengan lembaga pesantren.<sup>8</sup> Dalam kaitannya dengan pesantren, ulama biasa mendapat panggilan yang identik dengan pesantren binaannya, misalnya masyarakat Singaperbangsa menyebut K. H. Zainal Musthofa dengan panggilan lain “Ajengan Sukamanah”, karena pesantren yang ia dirikan pada tahun 1928 M diberi nama Sukamanah.

Kondisi sosial-politik masyarakat selama dikuasai pemerintah kolonial menjadi tantangan bagi para ulama untuk menentukan sikap pada kebijakan pemerintah yang berkuasa, berdasarkan prinsip *hablun minaAllah* terkait tanggung jawab spiritualnya dan *hablun minaannas* terkait tanggung jawabnya yang berkaitan dengan masyarakat luas. Realitas sosial masyarakat dan wawasan ideologis menjadi latar belakang pola relasi ulama dengan penguasa. Secara garis besar, hubungan ulama-*umara* (pemerintah) terlihat dari gejala-gejalanya di dalam pola akomodatif dan konfrontatif.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup>Zainul Milal Bizawie: menurut Abdurrahman Wahid, Pesantren dalam pengertian lebih luas tidak hanya mencakup sebagai pendidikan agama islam tradisional, tetapi juga mencakup pengertian sebuah komunitas orang muslim atau kaum muslimin yang memiliki identitas, simbol, dan tradisi budaya sebagai sebuah subkultur Islam di Jawa.

<sup>6</sup>Bizawie, *Laskar Ulama-Santri dan Resolusi Jihad*, hlm. 12.

<sup>7</sup>Sebutan ajengan biasa digunakan di daerah Jawa Barat, termasuk Tasikmalaya.

<sup>8</sup>Bizawie, *Laskar Ulama-Santri dan Resolusi Jihad*, hlm. 11.

<sup>9</sup>Dudung Abdurrahman, Lap. Penelitian: “*Ulama dan Umara: kajian Historis atas pola hubungan antara pemuka Agama dan Pemerintah di Tasikmalaya*” (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga,), hlm. 2.

Memasuki abad 20, Bangsa Indonesia memasuki zaman modern yang memfasilitasi bangsa Indonesia memasuki periode pergerakan nasional dalam bentuk baru, sebuah gerakan yang terorganisasi secara formal. Kesadaran akademis menumbuhkan wawasan kebangsaan Indonesia yang memunculkan rasa persatuan rakyat di seluruh wilayah kolonial Hindia Belanda. Kesadaran ini tumbuh akibat kebijakan politik etis khususnya dalam bidang pengembangan pendidikan.

Pendidikan gaya Barat telah melahirkan suatu kelas baru orang-orang Indonesia yang mempunyai kesadaran politik yang telah memakai *platforms* baru yang disiapkan pembaharuan politik atau, tanpa menghiraukannya, mengambil peranan utama dalam agitasi radikal baik di kota maupun di desa.<sup>10</sup>

Meskipun pada awalnya modernisasi pendidikan dimaksudkan pemerintah Hindia-Belanda untuk meningkatkan kualitas masyarakat jajahannya, kaum terpelajar secara barat memanfaatkan modernitas yang diajarkan kolonial untuk membentuk organisasi pergerakan yang dapat menyalurkan sikap antikolonial secara institusi. Di sisi lain, para ulama, baik di perkotaan maupun pedesaan segera membentuk organisasi seperti Sarekat Islam dan Muhammadiyah yang terbentuk dari kultur muslim perkotaan dan Nahdlatul Ulama (NU) yang berjejaring melalui pesantren-pesantren di daerah-daerah pedesaan.

Di tingkat lokal Tasikmalaya Jawa Barat, pada periode Hindia-Belanda, Bupati R. A. A. Wratanoeningrat membentuk organisasi keagamaan dengan tujuan untuk mengakomodasi para ulama di Tasikmalaya dalam sebuah

---

<sup>10</sup> Harry J. Benda, *Bulan Sabit Dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Masa Pendudukan Jepang*, terj. Daniel Dhakidae dan Alfian (ed.) (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), hlm.88.

organisasi keagamaan *Idzharu Baitil Muluk wal Ulama* (IBMU) agar tetap di bawah kontrol pemerintah. Pada saat itu, hampir semua ulama di Tasikmalaya bergabung dalam IBMU. Namun sejak kehadiran Nahdlatul Ulama (NU) di Tasikmalaya beberapa ulama mulai memisahkan diri dari IBMU dan bergabung dengan NU. Dengan demikian, secara psikologis para ulama di Tasikmalaya mulai terpolarisasi antara yang pro-pemerintah dan non-pemerintah.<sup>11</sup> Merujuk pada orientasi organisasi ulama kondisi tersebut menciptakan sentimen antar kampung yang berkepanjangan, mengingat masyarakat desa menjadikan ulama mereka sebagai panutan.<sup>12</sup> Pada era tersebut ulama yang bergabung dalam NU masih menjadi minoritas di Tasikmalaya.

Para ulama yang ikut bergabung dengan NU adalah golongan kiai muda yang sejalan dengan sikap non-kooperatif organisasi NU kepada pemerintah. Pelopor pemisahan diri ini antara lain Ajengan Sobandi Cilenga<sup>13</sup> dan santri-santrinya yang sudah menjadi kiai seperti Zainal Musthafa Sukamanah dan kemudian Ruhiat Cipasung.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Iip D. Yahya, "Dari Galunggung ke Tasikmalaya" dalam *Historia Soekapoera: Tasikmalaya Menjelang Abad XX* Vol. 1. No. 1 (Tasikmalaya: Soekapoera Institute, 2013), hlm.16.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Rifa Hazim (Cicit K. H. Zainal Musthafa), dan menurut Yuyus Yusuf Hazim (cucu K. H. Zainal Musthafa), pasca kemerdekaan integrasi para ulama berangsur membaik hingga sekarang. Mengenai penggunaan istilah ulama dan kiai, Pijper mengkategorisasikan Ulama ditujukan untuk pemuka agama yang terikat Dinas dengan pemerintah Kolonial sedangkan kiai digunakan untuk pemuka agama yang bergerak secara kultural tanpa terikat.

<sup>13</sup> Menurut Iip D. Yahya, pilihan Ajengan Sobandi pada NU bisa dirunut dari proses belajarnya di Makkah di bawah asuhan Syekh Mahfudz Tremas yang menjadi guru hampir semua pendiri NU. Masa Sobandi belajar di tanah suci diperkirakan bersamaan dengan Kiai Abdul Wahab Chasbullah, tokoh utama pendiri NU. Lihat Iip D. Yahya, *Ajengan Cipasung*, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2006 ), hlm. 16.

<sup>14</sup> Yahya, "Dari Galunggung ke Tasikmalaya", hlm.16.

Sikap politik K. H. Zainal Musthafa nampak pada keputusannya bergabung dengan NU yang pada saat itu NU di Tasikmalaya menjadi organisasi keagamaan yang non-kooperatif dengan kebijakan pemerintah Belanda. Sebagai partisipasinya dalam NU dan terutama menjelang berakhirnya pemerintahan Belanda, Kiai Zainal Musthafa mulai menunjukkan sikap yang lebih menantang terhadap pemerintah, dengan menyelenggarakan rapat-rapat gelap dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan anti pemerintah.

Menjelang pendudukan Jepang ke Jawa K. H. Zainal Musthafa berstatus tahanan pemerintah Belanda, sebagai langkah politis pemerintah militer Jepang dalam melakukan pendekatan kepada ulama K. H. Zainal Musthafa dibebaskan oleh pasukan Jepang pada Maret 1942. Namun politik akomodatif pemerintah Jepang tidak mendapatkan sambutan positif dari K. H. Zainal Musthafa. Penerapan kebijakan Jepang selanjutnya membangkitkan penentangan dari kalangan ulama karena tradisi *seikerei* bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian kebijakan wajib serah padi menambah sikap antipati K. H. Zainal Musthafa setelah kebijakan Jepang yang memaksakan tradisi *Seikerei*, pesantren Sukamanah dijadikan lumbung untuk menyelamatkan hasil panen warga dari kebijakan Jepang untuk meyerahkan dua kuintal setiap hasil panen.<sup>15</sup>

K. H. Zainal Musthafa mengorganisir santri dan masyarakat Cikembang untuk merespon serbuan tentara Jepang pada tanggal 25 Februari 1944, bertepatan dengan hari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ia

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Yuyus Yusuf Hazim.



menyadari bahwa tindakannya itu sebagai pilihan pribadi dan bukan atas nama lembaga NU. Secara organisatoris ia mengundurkan diri dari NU.<sup>16</sup> Terkait sikap politiknya pada pemerintah Jepang, K. H. Zainal Musthafa juga tercatat sebagai tokoh yang menghadiri perkumpulan Geraf (Gerakan Rakyat Anti Fasis).<sup>17</sup>

Konfrontasi K. H. Zainal Musthafa dengan pemerintah Jepang di tingkat lokal mampu memberi kontribusi pada proses politik di era pendudukan Jepang. Latar belakang sosial dan pergolakan wacana perlawanan menjadi daya tarik, karena seorang agamawan yang non-politisi, K. H. Zainal Musthafa bergerak secara kultural membangun basis perlawanan mulai dari tingkat akar rumput dan berperan serta dalam bangunan wacana anti-Fasis yang membentuk hegemoni perlawanan kepada pemerintah Jepang.

Gerakan anti-Fasis dan perjuangan K. H. Zainal Musthafa berhasil dipatahkan oleh hegemoni represif pemerintah Jepang, karena didukung kekuatan militer dan sistem pemerintahan terpusat gaya negara Fasis. Namun, sikap K. H. Zainal Musthafa dalam upaya melawan pemerintah Jepang dinilai unik karena melampaui antagonisme antar elemen sosial terjajah disamping totalitasnya pada akidah islam, terbukti dalam keterlibatannya dalam lingkaran pembentukan sel gerakan bawah tanah Gerakan Rakyat Anti Fasis (GERAF) yang diusung tokoh-tokoh organisasi kiri yang berafiliasi pada paham sosialis-komunis.

---

<sup>16</sup>Yahya, "Dari Galunggung ke Tasikmalaya", hlm.16.

<sup>17</sup> Aiko Kurasawa, *Kuasa Jepang Di Jawa: Perubahan Sosial Di Pedesaan 1942-1945* (Depok: Komunitas Bambu, Januari 2015), hlm. 537.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Penulisan ini diarahkan pada analisis sikap politik K. H. Zainal Musthafa dalam kajian pascakolonial dengan perspektif postmarxisme, maka penulis berupaya menyusun teks yang menampilkan masyarakat bumiputera sebagai subjek emansipatoris diantara kalangan penguasa kolonial.

Sikap politik K. H. Zainal Musthafa dikaji dari relasi yang bersifat konfrontatif antara K. H. Zainal Musthafa dengan penguasa Jepang. Dalam penelitian ini digunakan pembatasan tahun dan ruang lingkup kajian, pembahasan dimaksudkan agar penelitian dan pembahasan tidak melebar, sehingga hasilnya lebih fokus dan akurat.

Penelitian ini diberi judul “Sikap Politik Ajengan Sukamanah (Konfrontasi K. H. Zainal Musthafa Pada Penguasa Jepang 1942-1944 M)”. ruang lingkup kajiannya fokus pada sikap K. H. Zainal Musthafa pada penguasa Jepang yang menjalin relasi yang bersifat konfrontatif.

Batasan tahun dalam penelitian ini antara tahun 1942-1944 M. karena tahun 1942 adalah tahun awal pendudukan Jepang, dan K. H. Zainal Musthafa dibebaskan dari tahanan Belanda oleh tentara Jepang. Sementara tahun 1944 adalah tahun meletusnya perlawanan fisik yang melibatkan santri dan warga Sukamanah terhadap tentara Jepang. Perlawanan tersebut mengakibatkan K. H. Zainal Musthafa dan massa perlawanan ditangkap dan dieksekusi.

Untuk membantu penelitian maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang sosial-politik dan keagamaan yang mengitari K. H. Zainal Musthafa?
2. Bagaimana relasi perlawanan K. H. Zainal Musthafa dalam menghadapi hegemoni pemerintah Jepang?
3. Bagaimana tindakan perlawanan K. H. Zainal Musthafa terhadap pemerintah Jepang?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini adalah:
  - a. Mengetahui realitas sosial yang membentuk sikap politik K. H. Zainal Musthafa pada pemerintah Jepang.
  - b. Mengetahui sikap K. H. Zainal Musthafa dalam bangunan relasi anti-Jepang
  - c. Mengetahui tindakan perlawanan K. H. Zainal Musthafa pada pemerintahan Jepang.
2. Penelitian ini diharapkan berguna untuk:
  - a. Menambah koleksi pustaka berkaitan dengan sejarah ulama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya tentang K. H. Zainal Musthafa.
  - b. Melanjutkan penelitian yang sudah ada tentang K. H. Zainal Musthafa.

#### D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa karya tulis yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga menjadi serangkaian tinjauan pustaka yang memberi referensi dan mempermudah peneliti untuk mengetahui hal-hal yang belum dibahas oleh peneliti sebelumnya, karya-karya tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, laporan penelitian Dudung Abdurrahman berjudul "Ulama dan Umara (kajian Historis atas pola hubungan antara pemuka Agama dan Pemerintah di Tasikmalaya). Penelitian ini membahas pola hubungan antara ulama dan Pemerintah di Tasikmalaya pada periode 1901-1945. Penelitian ini memaparkan tipologi ulama di Tasikmalaya terkait hubungannya dengan pemerintah (*Umara*), polarisasi ulama yang diakibatkan intervensi pemerintah Kolonial. Di dalamnya pula membahas kronologi perjuangan K.H. Zainal Musthafa yang merujuk pada penelitian sebelumnya oleh Maman Abdul Malik Sya'roni. Adapun penelitian ini melanjutkan pembahasan tentang perlawanan K.H. Zainal Musthafa dengan objek penelitian sudut pandang yang berbeda, yakni membahas keterlibatan K.H. Zainal Musthafa dalam Sel Gerak (Gerakan Rakyat Anti-Fasis) dengan kajian postmarxis. Penelitian Dudung Abdurrahman menjadi rujukan untuk mengetahui geopolitik ulama di Tasikmalaya dan meninjau kontribusi K. H. Zainal Musthafa dalam dinamika keagamaan dan politik di Tasikmalaya.

Kedua, buku berjudul "Kuasa Jepang Di Jawa: Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1944" karya Aiko Kurasawa. Buku ini menganalisis kebijakan-

kebijakan Jepang di Indonesia pada tahun 1942-1944 dan pengaruhnya terhadap perubahan sosial di tingkat pedesaan di pulau Jawa. Aiko juga mendeskripsikan analisis pemberontakan yang terjadi pada era pendudukan Jepang, termasuk peristiwa perlawanan Sukamanah dan menyebutkan keterlibatan K. H. Zainal Musthafa dalam gerakan anti-Fasis. Maka penelitian ini mengkaji masalah keterkaitan K. H. Zainal Musthafa dengan tokoh-tokoh kiri dalam upaya perlawanan menghadapi pemerintah Jepang. Karya Aiko Kurasawa ini menjadi bahan pertimbangan bagi penulis tentang kondisi sosial pedesaan periode pendudukan Jepang dan menjadi bahan penelusuran tentang informasi keterlibatan K. H. Zainal Musthafa dalam gerakan rahasia anti-Fasis.

Ketiga, buku Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang karya Harry J. Benda. Buku ini menjelaskan sejarah perkembangan politik Islam Indonesia yang memasuki periode modern, dari masa peralihan hingga pendudukan Jepang di Indonesia. Benda memaparkan kondisi sosial-politik dan menitikberatkan pada peran pergerakan ulama dan umat muslim pada periode pendudukan Jepang. buku ini juga mengulas kontribusi perjuangan K. H. Zainal Musthafa. Adapun penelitian ini melanjutkan pembahasan pengorganisasian massa Sukamanah dalam upaya perlawanan menghadapi pemerintah Jepang.

Keempat, Tesis Nurul Hak “Perubahan Sosial Pesantren Di Tasikmalaya”. Karya ilmiah Nurul Hak menjelaskan tipe pendidikan tiga pesantren besar di Tasikmalaya dan pengaruhnya dalam perubahan sosial masyarakat di Tasikmalaya. Analisis Nurul Hak membahas peran Pesantren

Suryalaya dengan basis tarekat, Pesantren Cipasung yang fokus pada bidang pendidikan dan gerakan Pesantren Sukamanah pimpinan K. H. Zainal Musthafa. Adapun penelitian ini fokus pada sikap politik K. H. Zainal Musthafa terhadap pemerintah militer Jepang. secara keseluruhan dari penelitian yang sudah ada, penelitian ini bersifat eksploratif dalam studi kasus perlawanan Sukamanah.

### **E. Kerangka Teori**

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dalam rangka mengkaji sikap politik K. H. Zainal Musthafa terhadap penguasa Jepang, sikap politik tersebut dapat dilihat dari pola konfrontatif hubungan K. H. Zainal Musthafa dengan pemerintah militer Jepang. Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat menyajikan paparan analisis dari tindakan K. H. Zainal Musthafa dalam membangun relasi hegemoni melalui gerakan sosial sebagai upaya perlawanan terhadap rezim represif pemerintah Jepang yang membangun relasi hegemoni di tanah Jawa melalui politik akomodatif.

Untuk menganalisis, penulis menggunakan teori hegemoni Ernest Laclau dan Mouffe yang berkenaan dengan gerakan sosial dalam wacana politik. Menurut Laclau dan Mouffe hegemoni merupakan struktur dasar dalam wacana politik. Menurut mereka menganalisis politik tidak bisa keluar dari

topik tentang hegemoni, karena dalam setiap hubungan politik selalu ada kemungkinan untuk menciptakan hegemoni.<sup>18</sup>

Laclau dan Mouffe mendasarkan analisis politik mereka pada teori hegemoni Gramsci, dimana hegemoni digunakan untuk menyebutkan bentuk penguasaan terhadap kelompok tertentu dengan menggunakan kepemimpinan intelektual dan moral secara konsensus. Berbeda dengan Gramsci, Laclau dan Mouffe tidak lagi menggunakan konsep kelas sosial yang didasarkan pada determinasi ekonomi khas marxisme klasik. Sebaliknya Laclau dan Mouffe menolak pandangan ekonomi mengenai evolusi sosial yang diatur oleh satu logika ekonomi.<sup>19</sup> Sebagai kaum neo-marxis, di satu sisi mereka menyadari keragaman (pluralisme) sebagai hakikat dan kecenderungan yang niscaya dalam masyarakat.<sup>20</sup> Mereka menambahkan dimensi-dimensi lain dari pemikiran Gramsci, mereka mendasarkan identifikasi sosial pada wacana yang diartikulasikan.<sup>21</sup>

Artikulasi wacana menentukan identitas masyarakat, maka dalam konsep hegemoni Laclau dan Mouffe masyarakat dilihat sebagai masyarakat yang sadar akan kondisi sosial-politik. Sebagaimana menurut mereka, hegemoni selalu hadir dalam bentuk relasi sosial yang tentunya berdampak

---

<sup>18</sup>Boni Hargens, *Demokrasi Radikal: Memahami Paradoks Demokrasi Modern dalam Perspektif Postmarxis-Postmodernis Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe* (Jakarta: PARRHESIA, 2006) hal.61.

<sup>19</sup><https://dhutag.wordpress.com/20/02/21/laclau-mouffe-tentang-gerakan-sosial/>, diakses tanggal 7 maret 2017.

<sup>20</sup>Hargens, *Demokrasi Radikal*, hlm. 65.

<sup>21</sup> Daniel Hutagalung “Hegemoni dan Demokrasi Radikal-Plural”, dalam Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, *Hegemoni dan Strategi Sosialis: Postmarxisme+Gerakan Sosial Baru*, terj. Eko Prasetyo Darmawan (Yogyakarta: Resist Book, 2008), hlm. xxviii.



pada relasi politik.<sup>22</sup> Dengan begitu, konsep hegemoni Laclau dan Mouffe tidak lagi menempatkan kelas sosial tertentu di atas kelas sosial lainnya dalam bangunan hegemoni, melainkan hegemoni merupakan formasi atau susunan elemen masyarakat yang mengajukan tuntutan-tuntutan berbeda satu sama lain (tuntutan partikular). Menurut Laclau dan Mouffe, hegemoni adalah bagaimana elemen partikular mampu mengkonstruksi tuntutan mereka (*contingent (re)articulation*) menjadi universal.<sup>23</sup>

Keberbedaan dalam setiap elemen masyarakat merupakan logika perbedaan (*logic of difference*). *Logic of difference* dalam elemen terkecil disebut sebagai partikularitas individu, dimana totalitas hanya berlaku dalam ranah ini, sebagaimana Laclau dan Mouffe menolak totalitas universal. Totalitas partikular merupakan identitas individu yang dibentruk oleh artikulasi wacana. Kemudian untuk menyebut logika perbedaan antar individu Laclau dan Mouffe menyebutnya dengan istilah antagonisme. Kemudian antagonisme pada tingkat formasi hegemoni, dengan sendirinya menciptakan garis batas politik (*Political Frontier*) yang memisahkan formasi hegemoni perlawanan dengan formasi hegemoni rezim represif, sehingga membentuk pola hubungan yang bersifat konfrontatif. Antagonisme digunakan untuk menyebut sesuatu yang diluar satu elemen sosial yang partikular, dimana Laclau dan Mouffe tidak menafikan logika perbedaan ketika formasi hegemoni terbentuk.

---

<sup>22</sup> Hargens, *Demokrasi Radikal*, hlm. 61.

<sup>23</sup> Hutagalung, "Hegemoni dan Demokrasi Radikal-Plural", hlm. xxv.

Dalam konteks ini Laclau dan Mouffe menganut pandangan postmodernisme yang menganggap masyarakat sebagai konsep terbuka, bahwa masyarakat tidak bersifat tetap dan tertutup. Karena identitas bersifat tidak tetap, maka demokrasi juga bukan konsep yang tetap alias “harga mati”. Lebih spesifik Laclau dan Mouffe memahami Demokrasi sebagai penanda mengambang (*floating signifier*). Artinya, Demokrasi bersifat terbuka, menerima segala kemungkinan dan pemaknaan dan reartikulasi.<sup>24</sup> Lebih jauh lagi Laclau dan Mouffe menggunakan penanda kosong (*empty signifier*) untuk menyebutkan rantai kesetaraan yang dapat mengakomodasi tuntutan setiap elemen sosial, karena dengan kosongnya makna, menerima kemungkinan pemaknaan tersebut. Konsekuensi dari konsep masyarakat terbuka adalah hubungan antar elemen dalam formasi hegemoni bersifat rentan, dipengaruhi oleh pola hubungan yang bersifat akomodatif.

Dalam penulisan ini, penulis menganalisis sikap K. H. Zainal Musthafa yang dapat dilihat dari upayanya dalam membangun formasi hegemoni tandingan terhadap hegemoni pemerintah militer Jepang. sebagaimana K. H. Zainal Musthafa tercatat sebagai anggota perkumpulan yang merumuskan organisasi Geraf (Gerakan Rakyat Anti-Fasis) bersama tokoh-tokoh yang berafiliasi pada ideologi sosialis-komunis. Secara partikular dari Formasi anti-Fasis Geraf, K. H. Zainal Musthafa mengakomodasi tuntutan petani warga Cikembang dan kaum santri dalam formasi gerakan Sukamanah melalui wacana anti-Jepang yang lebih kental dengan motif agama.

---

<sup>24</sup> Hargens, *Demokrasi Radikal*, hlm. 67.

Formasi Gerakan Sukamanah yang terdiri dari kaum santri dan warga petani menjadikan pola gerakannya bercorak gerakan petani dan mengandung totalitas keagamaan yang dimiliki santri. Gerakan Sukamanah merencanakan kegiatan-kegiatan yang menciptakan kekacauan-kekacauan politik bagi pemerintah Jepang sebagaimana corak perlawanan petani, di sisi lain Gerakan Sukamanah telah siap menghadapi kemungkinan peperangan dengan mempersiapkan wacana Jihad perang dengan penguasa yang menindas.

Teori ini melihat hegemoni sebagai formasi kepentingan yang terdiri dari tuntutan-tuntutan partikular yang kemudian dipertemukan oleh rantai kesetaraan (*chain of equivalence*) bertumpu pada penanda kosong (*empty signifier*) yang dapat diterima Bersama, sehingga formasi hegemoni dapat melampaui totalitas partikular antar elemen masyarakat dan menciptakan garis antagonisme pada rezim represif Jepang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dan pendekatan politik. Pendekatan sosiologi menjadikan bentuk penelitian ini sebagai kajian sejarah sosial yang dalam penggambaran sejarahnya akan terungkap segi-segi sosial dari peristiwa yang dikaji.<sup>25</sup> Pendekatan sosiologi yang berkaitan dengan pembahasan gerakan sosial adalah pendekatan *behavioral* yakni menonjolkan tindakan atau perilaku aktor yang memimpin sebuah gerakan, latar belakang masyarakat yang dipimpinnya, dan interpretasi terhadap situasi pada zamannya. Selain itu pola-pola serta bentuk-bentuk gerakan dijadikan

---

<sup>25</sup> Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 11.

perhatian utama, termasuk juga hal-hal yang terjadi setelah adanya gerakan sosial tertentu.<sup>26</sup> Pendekatan politik digunakan untuk membangun persektif dimensi peran politik K. H. Zainal Musthafa. Berkaitan dengan luasnya cakupan dan pemaknaan terhadap politik, maka diperlukan spesifikasi pemaknaan politik. Dalam konteks ini, hal yang lebih penting untuk dimaknai adalah tentang dimensi politis manusia.<sup>27</sup> Menurut Laclau dan Mouffe, teori diskursus meliputi seperangkat pemahaman luas terhadap politik tidak semata-mata dibatasi oleh lembaga-lembaga (institusi-institusi), namun lebih jauh dari itu, politik dipahami sebagai sesuatu yang bersifat konstitutif terhadap makna sosial.<sup>28</sup> Senada dengan konsep politik Laclau dan Mouffe, Suhermanto Ja'far menjelaskan:

Sebuah keputusan bersifat politis apabila diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Adapun seorang politisi adalah orang yang mempunyai profesi mengenai masyarakat secara keseluruhan. Seorang non politisi pun dapat dikatakan mengambil sikap politik apabila dalam sikapnya mengacu pada masyarakat secara keseluruhan.<sup>29</sup>

Dalam hal ini K. H. Zainal Musthafa bertindak sebagai pemuka agama yang non politisi, namun gerakannya memberi kontribusi pada dinamika sosial-politik bangsa Indonesia di bawah kekuasaan Jepang. Kajian menyeluruh tentang latar belakang K. H. Zainal Musthafa diperlukan dalam penelitian ini sebagai wacana penunjang orientasi gerakan perlawanannya,

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>27</sup> Suhermanto Ja'far, *Pasang Surut Politik Kaum Sarungan* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 36.

<sup>28</sup> Hutagalung "Hegemoni dan Demokrasi Radikal-Plural", hlm. xxxi.

<sup>29</sup> Ja'far, *Pasang Surut Politik Kaum Sarungan*), hlm. 67.

untuk diarahkan pada analisis wacana atas relasi gerakan perlawanan K. H. Zainal Musthafa dengan tokoh-tokoh sosialis-komunis dalam sel Geraf.

Kemudian, perspektif Laclau dan Mouffe tentang masyarakat yang memiliki kesadaran politik memberi peluang bagi penulis untuk menggunakan pendekatan konsep tatanan sosial masyarakat sunda, yakni konsep *Tritangtu*. Pendekatan konsep *Tritangtu* digunakan untuk memaparkan tatanan sosial masyarakat Singaparna yang pada dasarnya adalah masyarakat Sunda. Maka loyalitas masyarakat terhadap ulama dalam penelitian ini dilihat sebagai ekspresi politik masyarakat Sunda yang sadar dengan peran dirinya dalam tatan sosial, karena dalam tatanan sosial-politik *Tritangtu*, relasi masyarakat, ulama, dan pemerintah adalah relasi kekuasaan yang tidak dapat dipisahkan.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan kajian pustaka, penulis melakukan pengumpulan data dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan K. H. Zainal Musthafa sebagai sumber primer, ditunjang sumber perpustakaan yang berkaitan dengan teori dan pembahasan penelitian ini sebagai sumber sekunder. Untuk melengkapi informasi, penulis melakukan wawancara kepada beberapa subjek yang pernah dekat dan menerima informasi secara dari pelaku sejarah.

Dilihat dari bentuknya penelitian ini merupakan penelitian sejarah, maka metode Historis digunakan dalam menguji dan merekonstruksi peristiwa-

peristiwa masa lalu berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan.<sup>30</sup> Untuk mencapai susunan yang sistematis dan teruji kredibilitasnya, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa tahapan untuk melacak informasi yang akan dijadikan rujukan. Adapun tahap-tahap yang akan ditempuh yaitu sebagai berikut:

### 1. Heuristik

Tahap ini merupakan teknik atau cara memperoleh, menangani dan memperinci bibliografi atau mengklarifikasi dan merawat catatan.<sup>31</sup> Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

#### a. Perpustakaan

Pengumpulan data dari penelitian terdahulu tentang K. H. Zainal Musthafa. Penulis menjadikan beberapa karya ilmiah yang telah di bahas dalam sub bab Tinjauan Pustaka sebagai sumber primer, penulis juga merujuk pada antologi jurnal *Historia Soekapoera* Vol. 1 dan Vol. 2 untuk melengkapi informasi penelitian tentang sejarah Tasikmalaya. Selain itu penulis juga mengumpulkan data melalui wawancara kepada subjek yang memiliki kedekatan keluarga dengan tokoh yang dibahas dan pernah menerima informasi dari saksi dan pelaku sejarah secara langsung.

#### b. Dokumentasi

---

<sup>30</sup>Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 32.

<sup>31</sup>Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 55.

Tahap ini merupakan pengumpulan data yang dijadikan sumber penelitian, data itu bisa berupa dokumen tertulis, gambar, atau audio visual yang berkaitan dengan objek penelitian. Semua sumber yang didapat kemudian dikumpulkan. Data tertulis penulis dapatkan dari keluarga K. H. Zainal Musthafa, dokumen Pesantren Sukamanah.

## 2. Verifikasi

Setelah semua sumber yang didapatkan terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah pengujian terhadap sumber yang telah didapat. Hal ini dilakukan guna memperoleh keabsahan sumber.<sup>32</sup> Tahap ini dilakukan dengan cara membandingkan beberapa sumber yang telah diperoleh untuk kemudian dicari data yang paling teruji keabsahannya. Kredibilitas sumber lisan dapat diakui apabila semuanya positif.<sup>33</sup> Sumber lisan juga dapat diakui kredibilitasnya jika memenuhi syarat bahwa sumber lisan tersebut mengandung kejadian penting yang diketahui umum, telah menjadi kepercayaan umum pada masa tertentu dan didukung oleh saksi yang berantai.<sup>34</sup> Sebagai langkahnya adalah mengkritisi narasumber yang telah diwawancarai dan membandingkan sumber-sumber yang diperoleh.

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 58.

<sup>33</sup>Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (yogyakarta: Bentang, 2005), hlm. 101.

<sup>34</sup>Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, hlm. 63.



### 3. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran sejarah juga disebut analisis sejarah yang berarti menguraikan peristiwa sejarah masa lampau. Analisis sejarah bertujuan melakukan sintesis atau sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah.<sup>35</sup> Sumber-sumber sejarah yang telah terkumpul dan telah melalui tahap verifikasi kemudian ditafsirkan menggunakan teori dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian.

### 4. Historiografi

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari sebuah penelitian sejarah. Historiografi berarti penyusunan peristiwa sejarah yang didahului oleh penelitian terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu,<sup>36</sup> atau dengan kata lain historiografi di sini merupakan cara penulisan dan pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.<sup>37</sup> Pada tahap ini data sejarah yang telah terkumpul telah diverifikasi dan telah melewati tahap interpretasi, untuk kemudian disusun menjadi sebuah karya tulis sejarah.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi suatu gambaran yang utuh dan jelas, serta mencapai hasil yang maksimal, maka perlu pembahasan secara sistematis. Sistematika

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 64.

<sup>36</sup>Badri Yatim, *Historiografi Islam* (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 5.

<sup>37</sup>Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, hlm. 67.

tersebut terwujud antara lain dengan mensistematiskan antara satu bab dengan bab yang lain agar memiliki keterkaitan secara sistematis dan logis. Penyajian penelitian ini terdiri dari lima bab, antara satu bab dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang saling mendukung. Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyusunnya dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan. bab ini merupakan pengantar yang membantu pembaca untuk memahami pembahasan pada bab berikutnya.

Bab II. Berisi penelusuran penulis mengenai dampak kebijakan Jepang pada kondisi sosial-politik yang menjadi realitas pembentuk sikap K. H. Zainal Musthafa dan masyarakatnya pada penguasa Jepang. Bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu kondisi sosial masyarakat Singaparna menjelang pendudukan Jepang, bagian ini membahas kondisi sosial-politik masyarakat Tasikmalaya menjelang pendudukan pemerintah Jepang. Pada sub kedua dibahas mengenai politik akomodatif pemerintah pendudukan Jepang. Dalam bab ini penulis berusaha membahas latar belakang sosial-politik yang membentuk sikap K. H. Zainal Musthafa dan masyarakat Sukamanah terhadap penguasa Jepang, kemudian berusaha memetakan sikap politik ulama pada kebijakan Jepang.

Bab III. Berisi K. H. Zainal Musthafa dalam pergumulan wacana anti-Jepang. Pada bab ini dipaparkan analisis wacana perlawanan K. H. Zainal Musthafa di tengah pergumulan wacana anti-Jepang terkait keterlibatannya dalam formasi sel Geraf. Berdasarkan penjelasan pada bab ini dapat diketahui fragmentasi wacana anti Jepang antara K. H. Zainal Musthafa dengan subjek lain dalam formasi Geraf. Dimana sel Geraf mengajukan wacana anti-Fasis sebagai alat pembendung hegemonisasi penguasa Jepang yang memungkinkan untuk mengakomodasi sikap perlawanan terhadap penguasa Jepang. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Dalam sub pertama dibahas profil K. H. Zainal Musthafa, dengan membahas profilnya akan diketahui wacana perlawanan yang membentuk sikapnya terhadap Jepang. Kemudian sub kedua akan dibahas konteks wacana anti-Fasis sel Geraf dan konteks anti-Jepang menurut versi K. H. Zainal Musthafa dalam fragmentasi wacana perlawanan sel Geraf. Dengan begitu akan terlihat apa yang disebut Laclau dan Mouffe sebagai antagonisme dalam formasi hegemoni. Selanjutnya sub ketiga, Akomodasi Sikap Anti-Jepang dalam sel Geraf.

Bab IV. Tindakan Perlawanan K. H. Zainal Musthafa. Bab ini mendeskripsikan tindakan K. H. Zainal Musthafa dalam upaya melawan penguasa Jepang. Terdiri dari langkah strategis organisatoris dan upaya pengorganisasian massa Sukamanah. Bab ini terdiri dari dua subbab diantaranya, Langkah Strategis Organisatoris, sub ini menjelaskan pilihan berorganisasi K. H. Zainal Musthafa terkait sikapnya terhadap Jepang. kemudian sub ketiga Pengorganisasian Massa Perlawanan Sukamanah,

menjelaskan proses pengorganisasian santri dan warga kampung Cikembang dalam upaya perlawanan terhadap pemerintah Jepang. subbab terakhir memaparkan akhir perlawanan Sukamanah.

Bab V. Penutup, Merupakan bab terakhir dalam pembahasan penelitian ini, berisi kesimpulan dan saran dari hasil analisis penelitian. Bab ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah, serta saran terkait hal-hal lain yang belum terjangkau oleh penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pendudukan militer Jepang di Indonesia yang dimulai era 1942 berdampak pada perubahan sosial-politik bangsa Indonesia. Pada masa pendudukannya, pemerintah militer Jepang melakukan politik akomodatif terhadap kekuatan sosial Islam dan tokoh nasionalis sebagai alat mobilisasi rakyat Indonesia untuk mendukung operasi militer Jepang.

Serangkaian aksi penolakan KH. Zainal Musthafa terhadap upaya akomodasi pemerintah Jepang merupakan implementasi sikap politik non-kooperatif, sebagaimana ditunjukkan dalam pola hubungannya yang bersifat konfrontatif dengan pemerintah Jepang. K. H. Zainal Musthafa terbuka dalam menjalin relasi dengan tokoh nasionalis dalam tujuannya melawan penindasan pemerintah Jepang. Disamping totalitasnya pada prinsip agama Islam dalam melawan penindasan, ia tetap terbuka menjalin relasi dengan beberapa aktivis anti-Fasis dalam sel Geraf yang secara ideologis berbeda pandangan tentang konsep kemerdekaan yang ideal. Wacana anti-Fasis menjadi wacana penghubung antar elemen ideologis dalam upaya perlawanan terhadap pemerintah Jepang.

Di dalam lingkungan internal Pesantren Sukamanah K. H. Zainal Musthafa melakukan pengorganisasian massa untuk melakukan serangkaian aksi perlawanan terhadap pemerintah Jepang. ia menyiapkan massa yang terdiri dari santri dan warga Cikembang yang pada umumnya adalah petani. Dua elemen berbeda dalam massa Sukamanah menjadikan bentuk khas perlawanan Sukamanah, yakni bentuk perlawanan petani yang diwarnai totalitas *Jihad fi Sabilillah*. Di sisi lain manuver K. H. Zainal Musthafa dari organisasi NU telah mendukung strategi kooperatif NU dalam mencapai tujuan kemerdekaan dari pemerintah Jepang.

## **B. Saran**

Perspektif posmodernisme dalam kajian sejarah Indonesia sangat menarik untuk dikembangkan, karena memberi ruang untuk mengkaji kembali dampak kolonialisme di Nusantara, kemudian memberi peluang perspektif tradisional untuk turut andil dalam disiplin sejarah. Apa yang tersaji dalam penelitian ini merupakan upaya melihat sejarah Indonesia dalam perspektif posmodern meskipun penerapannya masih begitu sederhana. Penulis menyarankan kepada peneliti-peneliti selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini. Banyak hal yang perlu dikaji dari kontribusi Ulama dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia beserta sumber sejarah lisan yang melengkapi keunikan sejarah ulama Nusantara..

Pada akhirnya, penulis dengan segala keterbatasan mengakui adanya berbagai kekurangan dalam penelitian ini. Untuk itu, bagi peneliti selanjutnya tidak sedikit ruang kosong yang dapat dilanjutkan maupun dikritik oleh peneliti selanjutnya. Semoga penelitian ini dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman, Dudung, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, Yogyakarta: Ombak, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos, 1999.
- Benda, Harry J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, terj. Daniel Dhakidae dan Alfian (ed.), Jakarta: Pustaka Jaya, cetakan pertama: 1980.
- Bizawie, Zainul Milal, *Laskar Ulama & Santri: Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945-1949)*, Tangerang: Pustaka Compass, 2014.
- Burhanudin, Jajat, *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*, Jakarta Selatan: Mizan (Anggota IKAPI), 2012.
- Gie, Soe Hok, *Orang-orang Di Persimpangan Kiri Jalan*, Yogyakarta: BENTANG, cetakan kedua 2005.
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta: Logos, 1999.
- Hargens, Boni, *Demokrasi Radikal: Memahami Paradoks Demokrasi Modern dalam perspektif Postmaris-Postmodernis Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe*, Jakarta: PARRHESIA, 2006.
- Ja'far, Suhermanto, *Pasang Surut Politik Kaum Sarungan*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang, 2005.

Kurasawa, Aiko, *Kuasa Jepang Di Jawa: Perubahan Sosial Di Pedesaan 1942-1945*, Depok: Komunitas Bambu, 2015.

Laclau, Ernesto dan Chantal Mouffe, *Hegemoni Dan Strategi Sosialis: Postmarxis + Gerakan Sosial Baru*, terj. Eko Prasetyo Darmawan, Yogyakarta: Resist Book, 2008.

Poeze, Harry, *Madiun 1948 PKI Bergerak*, Jakarta: KITLV dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.

Sumardjo, Jakob, *Sunda: Pola Rasionalitas Budaya*, Bandung: Kelir, 2011.

Suryanagara, Ahmad Mansur, *Api Sejarah Jilid 2*, Bandung: Salamadani, cetakan IV, 2012.

Yahya, Iip D., *Ajengan Cipasung: Biografi K. H. Moh. Ilyas Ruhiat*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.

Yatim, Badri, *Historiografi Islam*, Jakarta: Logos, 1995.

## **Jurnal**

Mudzakkir, Amin, “Kebijakan Ekonomi Kolonial di tasikmalaya 1930-1942”, dalam *Historia Soekapoera: Dinamika Perekonomian Tasikmalaya Pada Era Kolonial*, Vol. 1, No. 2., Tasikmalaya: Soekapoera Institute, 2013.

Salam, Muhajir. “Penjajahan Ekonomi di Tasikmalaya (Dinamika Eksploitasi dan Pertumbuhan Perkebunan 1677-1942)”, dalam *Historia Soekapoera*:

*Dinamika Perekonomian Tasikmalaya Pada Era Kolonial*, Vol. 1, No. 2., Tasikmalaya: Soekapoera Institute, 2014.

Yahya, Iip D. “Dari Galunggung ke Tasikmalaya”, dalam *Historia Soekapoera: Tasikmalaya Menjelang Abad XX*, Vol. 1, No. 1., Tasikmalaya: Soekapoera Institute, 2013.

### **Laporan Penelitian**

Hak, Nurul. 2003. *Perubahan sosial pesantren di Tasikmalaya pada paruh pertama abad ke-20 (1905-1950)* (Tesis). Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Gajah Mada.

Abdurrahman, Dudung. 1998. *Pemuka Agama dan Pemerintah di Tasikmalaya 1901-1945* (Laporan Penelitian Individual). Yogyakarta: Pusat Penelitian, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

### **Internet**

<http://www.nu.or.id/post/read/41244/dua-ulama-dari-singaparna>

<https://dhutag.wordpress.com/20/02/21/laclau-mouffe-tentang-gerakan-sosial/>

<http://portal.tasikmalayakab.go.id/index.php/en/home/letak-geografis>

[http://www.mapnall.com/id/Peta-Singaparna\\_1132025.html](http://www.mapnall.com/id/Peta-Singaparna_1132025.html)

<https://tirto.id/sekolah-sekolah-di-zaman-belanda-bXbV>

<https://phesolo.wordpress.com/2012/07/21/kondisi-dan-perkembangan-pendidikan-di-hindia-belanda-awal-abad-xx/>

<http://www.ansorpegiringan.or.id/kh-fadil-dan-kh-oenoeng-pendiri-nu-tasikmalaya/>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Diri

Nama : Ceng Romli  
Tempat/tgl. Lahir : Bandung, 07 Mei 1990  
Nama Ayah : Aceng Komarudin  
Nama Ibu : Romlah  
Alamat Asal : Jl. Mekar Asri No. 22 Mekarmulya, Panyileukan, Kota Bandung  
E-mail : [nyala.akswara@gmail.com](mailto:nyala.akswara@gmail.com)  
No HP : 0852 0087 2467

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

1. SDN Wirautama Tahun Lulus 2002
2. MTsN Sukamanah Tahun Lulus 2005
3. MAN Sukamanah Tahun Lulus 2008

#### 2. Pendidikan Non-Formal

1. Pondok Pesantren Asy-Syifa Cijantung 2
2. Pondok Pesantren Sukamanah
3. Pondok Pesantren Mazra'atul Ulum

### C. Forum Ilmiah/Diskusi

Ngariung Karinding (NGAKAR)

#### **D. Pengalaman Organisasi**

PMII

Kelompok Bermain Gorong-gorong Institute; Divisi Karinding

Suku Karinding Yogyakarta

J. R. Youthcoop Yayasan Kampung Halaman

